



## Peningkatan Kualitas Layanan Publik Melalui Pendataan Infrastruktur di Desa Lamabelawa

### *Improving The Quality Of Public Services Through Infrastructure Data Collection In Lamabelawa Village*

Thomas Raymondino Selo, Krisantus Simon H Molan, Stephanie Perdana Ayu Lawalu

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

[dinnosello@gmail.com](mailto:dinnosello@gmail.com), [kristianusmolan@unwira.ac.id](mailto:kristianusmolan@unwira.ac.id)

Alamat : Jalan Jend Achmad Yani No.50-52, Merdeka, Lama City, Kupang City, East Nusa Tenggara 85211

Korespondensi email : [dinnosello@gmail.com](mailto:dinnosello@gmail.com)

---

#### Article History:

Received: Mei 31, 2024

Revised: Juli 02, 2024

Accepted: Juli 31, 2024

**Keywords:** Infrastructure Data Collection, Public Service

**Abstract:** The devotion found a problem namely infrastructure data collection activities which are an important aspect in efforts to improve development in the village are not carried out regularly or there is no updating of data related to new infrastructure. The purpose of the activity carried out by the devotion is to assist in improving the quality of public services and as a benchmark in making policies related to infrastructure development in Lamabelawa village. The methods used in this activity are observation and interview. The result of this activity is that the village government can improve public services through infrastructure data collection which can help the village government in ensuring that development policies taken are in accordance with conditions and needs, providing maximum benefits for the Lamabelawa village community. Regular data collection can help the village government and the community to know the needs and conditions of infrastructure in the village.

---

**Abstrak** Pengabdian menemukan masalah yaitu kegiatan pendataan infrastruktur yang merupakan aspek penting dalam upaya peningkatan pembangunan di desa tidak dilakukan secara berkala atau tidak adanya pembuatan pembaharuan data terkait infrastruktur yang baru. Tujuan dari kegiatan dilakukan oleh pengabdian yaitu membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sebagai tolak ukur dalam membuat kebijakan terkait pembangunan infrastruktur di desa Lamabelawa. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah observasi dan wawancara. Hasil dari kegiatan ini adalah pemerintah desa dapat meningkatkan pelayanan publik melalui pendataan infrastruktur yang dapat membantu pemerintah desa dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diambil sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa Lamabelawa. Pendataan yang dilakukan secara berkala dapat membantu pemerintah desa dan masyarakatnya agar dapat mengetahui bagaimana kebutuhan dan kondisi infrastruktur di desa itu sendiri.

**Kata Kunci:** Layanan Publik, Pendataan Infrastruktur.

## PENDAHULUAN

Desa memiliki struktur sosial yang terorganisir dan pola hidup yang seragam, yang memiliki interaksi sosial antar individu terjadi secara intens, dan hubungan antara penduduk saling terikat

---

\* Thomas Raymondino Selo, [dinnosello@gmail.com](mailto:dinnosello@gmail.com)

oleh nilai-nilai, norma, dan tradisi yang sama. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979, dan UU No. 22 Tahun 1999, desa didefinisikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil perpaduan itu ialah suatu ujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur-unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain .(Chikmawati, 2019)

Pemikiran ini dapat disimpulkan bahwa desa adalah komunitas yang terbentuk berdasarkan interaksi sosial dan ekonomi, yang berbeda dengan masyarakat kota. Tentang desa dapat dipahami sebagai suatu wilayah kecil yang dihuni oleh sejumlah penduduk yang memiliki kesatuan norma, hal ini disimpulkan dalam UU No. 5 Tahun 1979, dan UU No. 22 Tahun 1999, desa didefinisikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki struktur sosial yang terorganisir dan pola hidup yang seragam, yang memiliki interaksi sosial antar individu terjadi secara intens, dan hubungan antara penduduk saling terikat oleh nilai-nilai, norma, dan tradisi yang sama.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan desa, peran pemerintah desa sangat inklusif, dalam arti pemerintah harus memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk desa secara keseluruhan. Kualitas pelayanan publik yang baik harus dilakukan pemerintah desa dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Permasalahan pelayanan tersebut merupakan efek buruk dalam tata kelola pemerintah desa yang mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan public (Khaidir Ali, 2020). Dengan demikian, pemerintah desa memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan berbagai jenis pelayanan public untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat desa secara keseluruhan.

Tugas pelayanan pemerintah desa secara garis besar meliputi pelayanan administratif, dimana pemerintah mempunyai tugas melakukan administrasi kependudukan seperti pendaftaran penduduk, pembuatan kartu keluarga, dan surat keterangan lainnya, berikutnya pemerintah desa juga mempunyai tugas pemberdayaan masyarakat dan mempunyai peran dalam pembangunan infrastruktur dasar yaitu memelihara dan melakukan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan,

jembatan, saluran irigasi, serta penyediaan sarana air bersih dan sanitasi, pendidikan, kesehatan,

Pelayanan infrastruktur atau sarana- prasarana di desa merupakan aspek penting dalam pembangunan desa dan meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat desa serta memfasilitasi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Dalam sebuah pemerintahan desa sangat diperlukan adanya upaya peningkatan pelayanan administrasi public, bukan hanya tentang membangun hubungan yang positif antara pemerintah desa dan masyarakat tetapi juga tentang penyediaan layanan. Salah satu bentuk pelayanan public yang dapat dilakukan pemerintah desa ialah dengan meningkatkan Pembangunan infrastruktur di desa. Pembangunan infrastruktur merupakan bentuk kepedulian pemerintah, wujud dari model Pembangunan tersebut adalah program Pembangunan infrastruktur pedesaan (PIIP) (Simbolon et al., 2021) Melalui Pembangunan infrastruktur yang inklusif, pemerintah desa dapat menunjukkan bentuk pelayanan mereka terhadap Masyarakat. Jadi infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pendataan berarti suatu proses pengambilan atau pengumpulan data atau dasar kajian, sedangkan infrastruktur merupakan sebuah sistem fasilitas publik, yang bersifat fundamental ditujukan kepada masyarakat ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat (Syah, 2020). Sehingga pendataan infrastruktur desa adalah suatu tindakan berupa pengumpulan data atau informasi yang berkaitan dengan fasilitas publik dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Kegiatan pendataan infrastruktur meliputi infrastruktur jalan, jembatan, sarana kesehatan, pendidikan, listrik, air bersih, sanitasi, dan lain-lain. Kegiatan pendataan infrastruktur di desa sangat penting karena dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk merencanakan, mengelola, dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Dewasa ini, peningkatan pelayanan administrasi public melalui pendataan infrastruktur di desa menjadi salah satu kegiatan yang tidak kalah penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan infrastruktur di desa. Hal ini memungkinkan untuk merencanakan pembangunan yang lebih efektif, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau peningkatan, serta memastikan alokasi sumber daya yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa secara lebih efisien. Selain itu, pendataan yang baik juga membantu dalam pemantauan dan evaluasi terhadap proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan di desa.

Pada desa Lamabelawa, kegiatan pendataan infrastruktur yang merupakan aspek penting dalam upaya peningkatan pembangunan di desa tidak dilakukan secara berkala atau tidak adanya pembuatan pembaharuan data terkait infrastruktur yang baru. Berdasarkan uraian diatas, pengabdian memberikan tawaran agar melakukan pembaruan data terkait infrastruktur yang ada di desa Lamabelawa yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan sebagai tolak ukur dalam membuat kebijakan terkait pembangunan infrastruktur di desa Lamabelawa.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan mulai pada bulan April – Juni 2024, yang terjadi di Desa Lamabelawa, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, yang merupakan menjadi sasaran dari kegiatan pengabdian ini. Desa Lamabelawa adalah salah satu desa dari enam belas desa yang berada di Kecamatan Witihama merupakan pintu masuk atau gerbang utama dari kecamatan Witihama. Melihat dari permasalahan yang telah dijelaskan, Pengabdian berusaha membangun komunikasi dengan aparat desa Lamabelawa, yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai masalah yang dihadapi. Metode yang dipakai oleh Pengabdian dalam kegiatan pendataan infrastruktur adalah proses pengumpulan informasi mengenai infrastruktur yang ada di desa Lamabelawa, pendataan infrastruktur, pengolahan data infrastruktur, pelaporan hasil pendataan.



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan program kegiatan

### **1. Persiapan**

Tahap persiapan dalam proses pendataan adalah langkah awal yang penting untuk memastikan data yang dikumpulkan berguna untuk tujuan penelitian. Pada tahap persiapan dalam proses pendataan infrastruktur di Desa Lamabelawa meliputi:

- a) Pengabdian melakukan komunikasi dengan pemerintah Desa Lamabelawa, terkait program kegiatan pendataan yang akan dijalankan di tempat pengabdian.

- b) Pengabdi melakukan pendekatan dengan ketiga orang Kepala Dusun terkait infrastruktur di setiap dusun.
- c) Pengabdi menentukan waktu terkait pelaksanaan pendataan infrastruktur dengan setiap Kepala Dusun.
- d) Pengabdi menentukan jenis infrastruktur yang akan didata (jalan dan transportasi, air bersih dan sanitasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, listrik)

## 2. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulann data adalah proses dimana data yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan sesuai dengan rencana. Tahap pengumpulan data dalam proses pendataan infrastruktur di desa Lamabelawa meliputi:

- a) Kegiatan pendataan mulai dilaksanakan pada 22 April 2024, dengan lokasi pendataan di Dusun Barat, bersama Kepala Dusun Barat.
- b) Pada tanggal 26 April 2024, Pengabdi bersama bersama Kepala Dusun Tengah melanjutkan kegiatan pendataan sampai selesai.

## 3. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tujuan untuk membuat catatan atau tabel yang berisi detail setiap infrastruktur yang telah didata seperti nama infrastruktur, jumlah atau ukuran, kondisi, dan keterangan, yang secara umum dibagi dalam lima jenis infrastruktur.

## 4. Pelaporan

Pada bagian ini, Pengabdi menyerahkan hasil pendataan kepada pemerintah Desa Lamabelawa untuk divalidasi. Selanjutnya data infrastruktur dibuat dalam ukuran yang lebih besar (baliho). Pada tanggal 08 Mei 2024, Pengabdi melakukan penyerahan data infrastruktur Desa Lamabelawa kepada pemerintah desa Lamabelawa.

## **HASIL**

Kegiatan pendataan infrastruktur merupakan bagian dari upaya pemerintah desa untuk mengumpulkan, mencatat, dan mengolah informasi mengenai kondisi, jenis, serta status infrastruktur yang ada di suatu wilayah desa, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan terkini dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengembangan infrastruktur yang ada di desa. Dalam teori pembangunan desa yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana

desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa (Fajri, 2017). Pendataan yang baik dan berkala, pemerintah desa dapat meningkatkan kualitas layanan infrastruktur yang lebih efisien bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan ini dimulai dengan pemaparan maksud dan tujuan dari program kegiatan pendataan infrastruktur kepada pemerintah Desa Lamabelawa.

### **3.1 Kegiatan Komunikasi dengan Sekdes Lamabelawa terkait data dan aset desa**



Gambar 2. Melakukan komunikasi dengan Sekdes Lamabelawa

Pengabdian melakukan komunikasi dengan pemerintah Desa Lamabelawa, dalam hal ini Sekretaris Desa, terkait data aset desa yang ada. Setelah melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah Desa Lamabelawa, Pengabdian mendapatkan jawaban bahwa data sementara atau pembaharuan data periode 2023/2024 belum ada atau masih menggunakan data yang lama. Pendataan yang berkala memungkinkan pemerintah untuk memantau kondisi infrastruktur secara real-time, mengidentifikasi kebutuhan perbaikan atau pengembangan, dan merencanakan anggaran dengan lebih efisien. Selain itu, data yang up-to-date membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Program kegiatan pendataan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Desa Lamabelawa, dan berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah desa, pendataan infrastruktur dilakukan perdusun agar lebih memudahkan. Desa Lamabelawa terbagi dalam tiga wilayah Dusun (dusun Timur, Dusun Tengah, Dusun barat).

### 3.2 Kegiatan Pendataan Infrastruktur



Gambar 3. Bak induk Desa Lamabelawa

Aktivitas pendataan mulai dijalankan bersama Kepala Dusun Barat pada 22 April 2024. Infrastruktur desa Lamabelawa yang berada di wilayah Dusun Barat secara garis besar meliputi lima unsur penting yaitu jalan, air bersih dan sanitasi, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan listrik. Pada kesempatan kedua, pendataan terjadi di wilayah dusun tengah dan dusun timur bersama kepala wilayah dusun timur, yang terjadi pada tanggal 26 April 2024 sampai selesai.

### 3.3 Pengolahan Data Infrastruktur

PEMERINTAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR KECAMATAN WITIHAMA											
DATA INFRASTRUKTUR DESA LAMABELAWA											
1. Jalan dan Transportasi			2. Air Bersih dan Sanitasi								
NO	JENIS INFRASTRUKTUR	JUMLAH/UKURAN	KONDISI		KETERANGAN	NO	JENIS INFRASTRUKTUR	JUMLAH/UKURAN	KONDISI		KETERANGAN
			BAIK	RUSAK					BAIK	RUSAK	
1	JALAN UTAMA	1	✓			1	BAK INDUK	1	✓		
2	JALAN DUSUN	15 JALUR	✓			2	BAK/VIBER DUSUN	6		✓	TIDAK TERPAKAI
3	DEKERUJEMBATAN	4	✓								
3. Pendidikan			4. Listrik dan Energi								
NO	JENIS INFRASTRUKTUR	JUMLAH/UKURAN	KONDISI		KETERANGAN	NO	JENIS INFRASTRUKTUR	JUMLAH/UKURAN	KONDISI		KETERANGAN
			BAIK	RUSAK					BAIK	RUSAK	
1	SEKOLAH DASAR	1	✓		SDK LAMABELAWA	1	LAMPU JALAN	19	✓		
2	TK/PAUD	1	✓		PAUD ST. ARNOLDUS	2	JUMLAH RUMAH YANG TERALIRI LISTRIK = 296 RUMAH				
5. Kesehatan											
NO	JENIS INFRASTRUKTUR	JUMLAH/UKURAN	KONDISI		KETERANGAN						
			BAIK	RUSAK							
1	KLINIK/APOTEK	2	✓		KLINIK PRATAMA POLITOBEN APOTEK CATALEYA						
2	POLINDES				DALAM PROSES PEMBANGUNAN						

Gambar 4. Hasil Pendataan Infrastruktur Terbaru Desa Lamabelawa

Berdasarkan pendataan infrastruktur yang terjadi di Desa Lamabelawa selama kurang lebih dua minggu. Pengabdian mulai melakukan pengolahan data infrastruktur dimana pengelompokan infrastruktur berdasarkan jenis infrastruktur, yang meliputi infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, listrik dan energi, air bersih dan sanitasi. Setelah melakukan pengolahan data infrastruktur Desa Lamabelawa, hasil yang ada diserahkan ke pemerintah desa Lamabelawa sebagai langkah konfirmasi lanjutan. Selanjutnya data infrastruktur dicetak dalam ukuran yang lebih besar, untuk menjawab permintaan dari pemerintah desa.

### **3.4 Penyerahan Data Infrastruktur**



Gambar 5. Penyerahan data infrastruktur ke pemerintah Desa Lamabelawa

Pengabdian menyerahkan data infrastruktur desa Lamabelawa kepada pemerintah desa Lamabelawa, yang merupakan hasil dari program kerja pendataan infrastruktur desa Lamabelawa. Hasil dari kegiatan ini memperoleh respon yang baik dari pemerintah desa, karena kegiatan ini dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan publik melalui pendataan infrastruktur yang dapat membantu pemerintah desa dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diambil sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa Lamabelawa.

### **DISKUSI**

Kegiatan pendataan infrastruktur desa dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di desa Lamabelawa berhasil memberikan gambaran kepada perangkat desa mengenai pentingnya pembaharuan data infrastruktur secara berkala. Pengabdian melihat adanya hasil yang diperoleh yaitu adanya kesadaran akan pentingnya pembaharuan data secara berkala sehingga mampu memastikan pembangunan infrastruktur yang efektif dan berdampak positif bagi kualitas hidup masyarakat



Desa Lamabelawa. Kegiatan pendataan ini dapat menjadi motivasi dalam membangun kesadaran kepada perangkat desa sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa Lamabelawa.

## **KESIMPULAN**

Pendataan infrastruktur di desa sangatlah penting dilakukan secara berkala demi peningkatan kualitas layanan publik. Pendataan yang dilakukan secara berkala dapat membantu pemerintah desa dan masyarakatnya agar dapat mengetahui bagaimana kebutuhan dan kondisi infrastruktur di desa itu sendiri. Di samping itu juga, pendataan yang dilakukan secara berkala dapat membantu pemerintah desa atau pihak terkait merencanakan perbaikan, pemeliharaan, dan pembangunan baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah desa diharapkan dapat memastikan pembangunan infrastruktur yang efektif dan berdampak positif. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan yang sekiranya bermanfaat untuk peningkatan kualitas layanan publik di Desa Lamabelawa, yaitu Kegiatan program pendataan infrastruktur di Desa Lamabelawa ini berjalan lancar dan mendapat respon baik dari pemerintah desa. Melalui program pendataan infrastruktur membantu pemerintah desa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan melakukan perencanaan perbaikan, pemeliharaan, dan pembangunan infrastruktur baru. Perlu adanya perencanaan pembangunan infrastruktur yang jelas dan terperinci berdasarkan data dan kebutuhan Masyarakat dan adanya survei atau dialog dengan masyarakat untuk mengetahui infrastruktur apa saja yang sangat dibutuhkan. Selain itu harus ada jadwal pemeliharaan rutin untuk memastikan infrastruktur yang telah dibangun tetap berfungsi dengan baik dan berumur panjang dan penetapan waktu pendataan yang rutin, misalnya setiap tahun atau dalam setengah tahun, dengan tujuan dapat mengetahui kondisi dan kebutuhan infrastruktur di desa. Pemerintah Desa juga perlu menginformasikan kepada masyarakat tentang rencana dan perkembangan infrastruktur di desa secara terbuka. Misalnya mengadakan papan informasi terkait infrastruktur yang ada di desa. Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan agar peningkatan pelayanan publik melalui pendataan infrastruktur secara berkala dapat diterapkan agar mampu memastikan pembangunan infrastruktur yang efektif dan berdampak positif bagi kualitas hidup masyarakat Desa Lamabelawa.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Pengabdian mengucapkan terimakasih kepada pemerintah desa Lamabelawa yang telah menerima dan memfasilitasi pengabdian dalam kegiatan pengabdian ini. Pengabdian juga mengucapkan limpah terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah menyelenggarakan kegiatan MBKM. Singkatnya pengabdian mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses pengabdian, baik dalam bentuk dukungan doa, motivasi, dan materil.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Chikmawati, Z. (2019). Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia. *Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1).
- Fajri, L. M. N. (2017). PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA. *Jurnal Unwmataram*, 1(1).
- Khaidir Ali, A. S. (2020). TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA PEMATANG JOHAR. *Jurnal Dharmawangsa*, 14(4).
- Simbolon, D. S., Sari, Julita, Purba, Yolanda, Y., Siregar, Indah, N., Risa, Salsabila, &, & Manulang, Y. (2021). PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2).
- Syah, H. (2020). PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA PENGKENDEKAN KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA. *Jurnal Ilmiah*, 17(12).